PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2017

KANTOR :
JALAN LETJEND SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH,
JAKARTA PUSAT.
WWW.PT-JAKARTA.GO.ID

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangkat mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.HUM**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2017

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Dr. H. HERRI SWANTORO, SH., MH
NIP. 19590904 198403 1004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.HUM
NIP. 19520601 197802 1001

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		1. Perkara Perdata	100%
		2. Perkara Pidana	100%
		3. Perkara Tipikor	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		1. Perkara Perdata	93%
		2. Perkara Pidana	94%
		3. Perkara Tipikor	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	
		1. Perkara Perdata	15%
		2. Perkara Pidana	47%
		3. Perkara Tipikor	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		• Kasasi	
		1. Perkara Perdata	30%
		2. Perkara Pidana	36%
		3. Perkara Tipikor	35%
		• Peninjauan Kembali (PK)	
		1. Perkara Perdata	66%
		2. Perkara Pidana	82%
		3 Perkara Tipikor	90%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	70 (IKM)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	
		1. Perkara Perdata	100%
		2. Perkara Pidana	100%
		3. Perkara Tipikor	100%
		b Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	

			• Perkara Tipikor	100%
3.	Peningkatan kualitas pengawasan		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
4.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Hakim yang lulus assessment Hakim Tinggi dalam rangka promosi jabatan	100%

No.	Program	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 03	Rp. 213.856.000,-
		(Dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 34.216.076.000,
		(Tiga puluh empat milyar dua ratus enam belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 170.000.000,
		(seratus tujuh puluh juta rupiah)

Jakarta, 2 Januari 2017

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Dr. H. SUNARKI SWANTORO, SIP., MH
NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.HUM
NIP. 195206011978021001